

SKRIPSI

**PERILAKU PEMILIH PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH TAHUN 2020 DI KECAMATAN HERLANG KABUPATEN
BULUKUMBA**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

SKRIPSI

**PERILAKU PEMILIH PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH TAHUN 2020 DI KECAMATAN HERLANG KABUPATEN
BULUKUMBA**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diusulkan Oleh :

Nita Eska

Nomor Induk Mahasiswa: 10564110717

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

04/02/2022

1 cap
Sub. Alumni

R/0017/MPM/2200
ESK

P

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN HASIL

Judul Penelitian : Perilaku pemilih perempuan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.
Nama Mahasiswa : Nita Eska
Nomor Stambuk : 105641107017
Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Menyetujui:

Pembimbing I


Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si

Menyetujui:

Pembimbing II


Nur Khaerah, S.IP., M.IP

Mengetahui,

Dekan

Ketua Jurusan

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Pemerintahan




Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah di terima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan undangan penguji skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 010/FSP/A.4-II/I/43/2022 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ketua

Dr. H. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris

Andi Luhur Prianto, S.I.P., M.Si

TIM PENILAI

PENGUJI

1. Dr.H. Amir Muhiddin, M.Si

()

2. Ahmad Taufik, S.I.P., M.AP

()

3. Nur khaerah, S.I.P., M.IP

()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nita Eska

Nomor Stambuk : 105641107017

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelaran akademik.

Makassar, 29 Januari 2021

Yang Menyatakan,

Nita Eska

ABATRAK

Nita Eska. 2021 Perilaku Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba
(Dibimbing Oleh Dr. Hj.Budi Setiawati, M.Si dan Nur Kharah, S.IP., M.IP)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku pemilih perempuan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan objek pada masa sekarang secara kualitatif data yang diperoleh dari penelitian. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan jumlah informan 6 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data digunakan yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pendekatan Sosiologis, masyarakat Desa Kelurahan Bonto Kamase dalam pendekatan sosiologis yaitu masyarakat memilih calon kepala daerah melihat dari segi pendidikan suatu calon. Karena pendidikan suatu calon akan membentuk pola pikir yang sehat, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat semakin besar kecenderungan untuk berpartisipasi dalam pemilihan. (2) Pendekatan Rasional masyarakat melihat dari visi dan misi calon. Karena masyarakat sangat memperhatikan visi dan misi yang jelas dari calon, beserta program-program yang akan dijalankan dengan begitu akan jelas arah kepemimpinan kedepannya. (3) Pendekatan Psikologis masyarakat Desa Kelurahan Bonto Kamase dalam pendekatan psikologis, masyarakat tidak terlalu memperhatikan identitas partai, dan masih ada pemilih melakukan pemilihan hanya dikarenakan poster dari para kandidat ditambah dengan pemilih hanya mengikuti pilihan orang tuanya dalam menentukan pilihan. (a.) Faktor Pendukung faktor pendukung suatu masyarakat adalah perilaku pemilih yaitu masyarakat memilih figure atau kepribadian dari seorang calon, kandidat yang memiliki kepribadian yang baik akan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, hal itu dapat menunjang kesejahteraan dan kemajuan suatu negara. (b) Faktor penghambat Faktor penghambat yaitu masyarakat kebanyakan terhambat mengikuti pemilihan dikarenakan masyarakat tersebut berada diluar daerah sehingga tidak dapat ikut dalam pemilihan.

Kata Kunci: Perilaku Pemilih, Pemilihan Kepala Daerah.

KATA PENGANTAR



“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu “

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan baik ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perilaku Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba”** shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan suatu nikmat yang tiada ternilai dalam pelaksanaan penelitian skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, walau sedikit mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat kerja keras penulis dan adanya bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis ayahanda **KAMARUDDIN** dan ibunda **SUHARNI** yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas

segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ibu Dr.Hj.Budi Setiawati,M.Si selaku pembimbing I yang telah sabar dan tak kenal lelah dalam membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Nur Khaerah, S.IP., M.IP selaku pembimbing II yang tak kenal lelah membimbing dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. DR. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.
6. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

8. Seluruh Civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, Bawaslu Kabupaten Bulukumba, Kantor Camat Helang, dan Kepala Desa se-kecamatan Helang yang sangat welcome telah mengizinkan untuk penelitian.
10. Seluruh saudara angkatan Renaisans 2017 khususnya kelas Ilmu Pemerintahan B 2017 tak terkecuali teman-teman KKP angkatan ke-XXI Fisipol Unismuh Makassar yang telah menjadi keluarga bagi penulis.
11. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar dan telah menjadi keluarga saya dan selalu memberikan support dan membantu penulis selama kuliah.
12. Kakak saya tercinta Andis serta adik tersayang selalu memberikan support, mendoakan dan membantu penulis selama kuliah.

Terlalu banyak orang yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga tidak akan muat bila dicantumkan dan dituturkan semuanya dalam ruang yang terbatas ini, kepada mereka semua tanpa terkecuali penulis ucapkan terimakasih yang teramat dalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Makassar, 29 Januari 2021

Nita Eska

DAFTAR ISI

SAMPUL	I
PERSETUJUAN SKRIPSI	II
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR	III
HALAMAN PERNYATAAN	IV
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL	XI
DAFTAR GAMBAR	XII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu	5
B. Konsep Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	6
C. Konsep Pemilih Perempuan dan Jender	10
D. Konsep Perilaku Pemilih	13
E. Konsep Partisipasi Politik	22
F. Kerangka Pikir	30
G. Fokus Penelitian	31
H. Deskripsi Fokus Penelitian	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	33
B. Jenis dan Tipe Penelitian	33
C. Sumber Data	34
D. Informan Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	36
G. Teknik Keabsahan Data	37

BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Wilayah Penelitian	39
B. Hasil Penelitian Perilaku Pemilih Perempuan Dalam Pilkada Di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba	46

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA	70
----------------------	----

LAMPIRAN	72
----------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	5
Tabel 3.1 Informan penelitian	33
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Kabupaten	40
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Herlang	41
Tabel 4.3 Data Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati KPU Bilukumba	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian	30
Gambar 4. Peta Luas Wilayah	49
Gamba 4.2 Struktur Organisasi Kecamatan Herlang	44



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi sebagai sistem politik, mendiktekan bahwa negara demokrasi adalah negara yang mampu mengajak seluruh elemen masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik dan pemerintahan. Secara sederhana, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang jalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan demikian secara tidak langsung, tanda negara mencapai modernisasi politik adalah dengan suksesnya menjalankan pemerintahan dengan campur tangan seluruh rakyat termasuk dalam elemen kecil seperti pemerintahan daerah.

Ikut serta dalam pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik minimal warga negara. Memang, di sebagian besar negara di dunia, termasuk di Indonesia, ikut serta dalam pemilu merupakan bagian dari apa yang disebut Bruce Ackerman dan James Fishkin sebagai *Civi Privatus*. Mengikuti pemilu merupakan urusan pribadi, meskipun hal ini menyangkut urusan kenegaraan atau politik. (Kacung Marijan 2010)

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekali gus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum adalah masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan, dan mempengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menjankan pemerintahan demokrasi adalah dengan berpartisipasi di dalam pemilihan umum langsung (pemilu). Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pemilu bererti pelaksanaan demokrasi sudah semakin membaik. Namun tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu mengalami peningkatan jumlah partisipasi masyarakat di tahun 2020.

Dalam memahami perilaku pemilih masyarakat, secara garis besar ada tiga model pendekatan menjelaskan bagaimana perilaku pemilih sebenarnya. Tiga model ini adalah: pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional. Perempuan sebagai anggota masyarakat yang memiliki perilaku pemilih, mendapatkan banyak faktor yang mempengaruhi dalam menentukan pilihan. Faktor-faktor yang tersebut menyebabkan pergeseran perilaku pemilih perempuan hingga membuat pemilih perempuan menunjukkan pilihan politiknya. Perilaku pemilih perempuan lebih konteks dibandingkan laki-laki karena perempuan memiliki peran ganda sekali yakni pada sektor domestik dan sektor non domestik.

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah yang ikut dalam pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia tahun 2020 bersama dengan 270 daerah lainnya. Berdasarkan data di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada tahun 2020 pemilih yang terdaftar pada (DPT) sebanyak 21.001 pemilih. Dan terdiri dari 9.808 pemilih laki-laki dan 11.203 pemilih perempuan. Artinya jumlah partisipasi pemilih perempuan di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba lebih banyak pemilih perempuan dibandingkan pemilih laki-laki (Nurwahidah, 2020).

Ada beberapa kendala dalam perilaku pemilih yaitu perilaku yang berubah-ubah dari pemilih menunjukkan bahwa pemilih itu belum berada pada pilihan yang matang karena sewaktu-waktu yang masih belum sesuai dengan kondisi dan waktu. Selain itu pemilih yang masih berada dalam kondisi yang bimbang.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik mengangkat judul tentang “**Perilaku Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.**”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perilaku pemilih perempuan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih perempuan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perilaku pemilih berdasarkan pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan pendekatan rasional dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perilaku pemilih perempuan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.

C. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Peneliti ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca, dan menjadi peneliti sebagai acuan untuk melihat bagaimana perilaku pemilih perempuan yang ada pada penelitian ini dalam bidang pemerintahan diharapkan penelitian ini mampu membantu pemerintah untuk melihat tingkah laku pemilih guna menjadi bahan evaluasi.

2. Secara Praktis:

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini di harapkan mampu menjadi bahan bacaan untuk mengetahui perilaku pemilih di berbagai daerah.
- b. Bagi pemerintah, peneliti berharap dengan penelitian ini menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah dan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan juga menjadi bahan untuk sosialisasi untuk mengetahui bagaimana perilaku pemilih.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian dalam penelitiannya yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan Muhammad Harish Fahmi dan Agus Machfud Fauzi dengan judul penelitian “Perilaku Pemilih Masyarakat Kabupaten Lomongan Pada Pilpres 2019”, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya. Seperti faktor sosiologis, psikologis dan rasional. Berkaitan dengan faktor sosiologis, kinerja yang baik lebih dipilih dari pada latar belakang Pendidikan seorang calon kandidat. Faktor psikologis dapat dilihat dari peran media massa, peran partai politik dan masyarakat sendiri yang turut ikut serta dalam mempromosikan citra kandidat. Perilaku prmilih juga berkaitan dengn faktor pilihan rasional yang menunjukkan bahwa masyarakat dalam menentukan pilihannya mempertimbangkan pengalan dan melihat proyeksi.

2. Penelitian oleh Anzal B. P Ibrahim yang berjudul "Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014" . Penelitian ini memperoleh hasil bahwa dari pendekatan sosiologis, tidak banyak pemilih yang menunjukkan pilihan politiknya, beda halnya dengan psikologis disini pemilih memperhatikan perilaku dengan melihat apa yang menjadi tawaran besar calon kepala masyarakat sedangkan dari pendekatan rasional pemilih pemula melihat dari kinerja dan kemampuan dari seorang kandidat.
3. Penelitian Rianto Pusida, Agustinus Pati Lambey dengan berjudul "Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 (Studi Tentang Efektivitas Kampanye) Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendekan psikologis merupakan pendekan tang efektif dalam memenangkan suara masyarakat, dimana pemilih akan memilih hanya berdasarkan kedekatan dengan seorang kandidate. Begitu hal dengan pendekatan rasional yang merukan salah pendekatan yang menjadi kunci kemenangan kebanyakan pasangan calon dimana cenderung masyarakat modern ini lebih prafmatis dan lebih mengutamakan keuangan dengan mendapatkan uang, sembako. Jadi pendekatan rasional melalui money politik misih sangat efektif untuk memnangkan peraturan politik.

B. Konsep dan Teori

1. Konsep Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan kepala daerah merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemilihan kepala daerah salah satu prinsip demokrasi ini dapat mewujudkan masyarakat sebagai pemegang

kedaulatan untuk menentukan kebijakan kenegaraan. Melalui pemilihan kepala daerah masyarakat sebagai peserta pemilih, yang selanjutnya membawa perubahan untuk melahirkan pemimpin selanjutnya.

Pilkada mengemuka menjadi isu nasional pasca terbitnya keputusan mahkamah konstitusi No. 14/PUU-XI/2013. Keputusan MK tersebut menetapkan penyelenggaraan pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan eksekutif (Presiden dan wakil Presiden) secara serentak pada tahun 2019 dan pemilu seterusnya. Keputusan MK ini pun mendorong DPR dan Presiden yang sama-sama mempunyai kewenangan legislasi untuk secara komprehensif-integral mendesain ulang penyelenggaraan pemilu, termasuk penyelenggaraan pilkada, di Indonesia (Seran, 2017).

Apabila menganalisis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang termuat dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1 (2020) – 124 – Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sejatinya terdapat mekanisme yang dapat dilakukan apabila terdapat kondisi yang memaksa atau memungkinkan tahapan pemilihan kepala daerah harus ditunda.

Pilihan tersebut berupa dilakukan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan. Pasal 120 undang-undang pilkada menyebutkan bahwa pemilihan lanjutan adalah sebuah mekanisme penundaan pilkada yang nanti melanjutkan tahapan yang terhenti, adapun syarat ditetapkan pemilihan lanjutan, tertuang dalam pasal 120 ayat (1) berbunyi: “Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah

pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan.” (Hasibuan, 2020).

Pilkada serentak merupakan upaya untuk menciptakan *local accountability*, *political equity* dan *local responsiveness*. Dengan begitu, demokratisasi di tingkat lokal terkait erat dengan tingkat partisipasi, dan relasi kuasa yang dibangun atas dasar pelaksanaan azas kedaulatan rakyat. Selain itu, hasil pilkada juga harus mampu menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik. Pilkada yang baik akan melahirkan pemerintahan yang baik. Pilkada yang diselenggarakan secara lebih profesional, demokratis, akan memberikan dampak nyata terhadap perubahan politik.

Pilkada sejatinya adalah menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi rakyat dan daerahnya. Harapannya melalui pilkada akan lahir pemimpin daerah yang mampu memenuhi ekspektasi rakyat secara mayoritas, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kedaulatan rakyat secara bermartabat. Ekspektasi rakyat ini juga menuntut perubahan besar yang terwujud dalam kebijakan-kebijakan yang pro rakyat (Akbar, 2017).

Pengertian pemilihan kepala daerah dapat dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan atau mengenai sirkulasi elite, yang dilakukan secara periodik dan tertib(Surbakti, 2010).

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut pilkada atau pemilukada, adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan. Oleh karena itu kepala daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggung jawabkannya. Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen – elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislatif, terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra (Nur Kholis, 2021).

Dalam pasal 1 peraturan komisi pemilihan umum republik indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 menjelaskan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota, selanjutnya disebut pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Serupa dengan yang dinyatakan oleh (Anugrah, 2005) bahwa tujuan pilkada untuk mewujudkan otonomi daerah. Dalam pemberian hak pilih secara langsung kepada masyarakat dalam pilkada dengan memenuhi beberapa aspek demokratisasi seperti meningkatkan partisipasi partai politik, meningkatkan kompetensi politik, meningkatkan legitimasi politik kepala daerah, dan meningkatkan akuntabilitas politik.

2. Konsep Pemilih Perempuan dan Gender

Membedakan pemilih perempuan dan laki-laki yang paling mendasar menurut para ahli pola gender didasarkan pada faktor-faktor seperti:

1. Faktor biologis, perbedaan gender yang paling mendasar bahwa adanya perbedaan fisik yang mencolok. Seperti halnya pada perempuan bahwa memiliki peranan sebagai pengatur rumah tangga karena secara fisik bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk mengandung, melahirkan dan mengasuh anak dan memberi ASI. Sedangkan laki-laki memiliki otot yang lebih besar, maka mereka mempunyai tugas besar untuk mencari nafkah untuk keluarga. Hal tersebut memang sudah ada dasarnya yang berasal dari organisasi kemasyarakatan di setiap budaya manusia (Nisa & Nuqul, 2012).
2. Faktor sosialisasi, perbedaan yang menekankan pada ekspektasi dan standar yang berbeda-beda. Dimana perspektif ini pengalaman sosial yang

dialami anak perempuan dan laki-laki yang menguatkan perbedaan pada sikap, minat, keahlian, dan personalitas yang akan terbawa hingga dewasa (Nisa & Nuqul, 2012).

3. Faktor peran sosial, perbedaan yang didasarkan pada anggota keluarga, pekerja, dan anggota komunitas atau masyarakat. Dimana dalam dunia kerja peran okupasional yang didasarkan jenis kelamin. Seperti pekerjaan perempuan. Dari uraian diatas bahwa perbedaan mengenai perempuan dan laki-laki dapat dinilai dari aspek sifat, perempuan yang memiliki sifat hangat, emosional, lemah lembut dan pasif sebagai sifat feminin, sedangkan laki-laki memiliki sifat rasional, kompetitif, dominan, tidak bergantung dan penuh percaya diri sebagai sifat maskulin (Nisa & Nuqul, 2012).

Dari uraian diatas bahwa perbedaan mengenai perempuan dan laki-laki dapat dinilai dari aspek sifat, perempuan yang memiliki sifat hangat, emosional, lemah lembut dan pasif sebagai sifat feminin, sedangkan laki-laki memiliki sifat rasional, kompetitif, dominan, tidak bergantung dan penuh percaya diri sebagai sifat maskulin (Nisa & Nuqul, 2012).

Prinsip hak asasi manusia bukanlah salah satu dari alasan perempuan dengan diberikannya kesempatan untuk terlibat secara penuh dalam politik. Alasan-alasan praktis perempuan harus terlibat yaitu seperti: pertama, perempuan adalah setengah dari populasi sebuah negara. Jika mereka termarginalisasikan dari partisipasi penuh dan setara dalam proses dan kepentingan keputusan politik,

maka sebuah negara tidak dapat dikatakan sepenuhnya demokratis. Sebagaimana dinyatakan dalam 4 deklarasi universal tentang demokrasi oleh persatuan antar parlemen bahwa pencapaian demokrasi memerlukan adanya kemitraan yang tulus antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan urusan masyarakat, dimana dengan bekerjasama secara setara dan saling melengkapi, sedangkan perbedaan yang miliki saling memperkaya satu sama lain (Bilber, Mohan, & Ryan, 2006).

Kedua, pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan pemerintahan sebuah negara sangatlah penting untuk kehidupan masyarakat. Perempuan seringkali mengikutsertakan kebutuhan keluarga sebagai pertimbangan untuk mendapatkan cakupan perspektif yang lebih luas. Perempuan memiliki pengalaman, kebutuhan, dan perspektif berbeda dengan laki-laki. Dengan melibatkan perempuan memastikan akan mencapai lebih representatif, terutama pada kebutuhan perempuan dalam pembuatan kebijakan dan program (Bilber, Mohan, & Ryan, 2006).

Ketiga, melibatkan perempuan masuk akal secara ekonomi. Hasil dari forum ekonomi dunia, komisi sosial ekonomi asia & pasifik dan mckinsey & company menjelaskan bahwa kesetaraan gender menghasilkan masyarakat yang lebih makmur dimana roda bisnis akan berjalan lebih baik dan melibatkan perempuan di seluruh tingkat organisasi akan membantu tercapainya hal ini (Bilber, Mohan, & Ryan, 2006).

Pada prinsip perempuan dapat dikatakan bahwa pemilih perempuan dalam proses politik dan pemilu, sesuatu hak dasar dalam partisipasi dalam pemi saja,

melainkan perempuan dalam prinsip praktisnya melibatkan perempuan akan menjadi kesempatan besar untuk menghadirkan pemilu yang bebas dan adil dalam membangun masyarakat yang inklusif, demokratis dan makmur.

3. Konsep Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih diartikan dengan pernyataan sebagai "perilaku pemilih adalah tingkah laku atau tindakan individu dalam proses pemberian suara dalam penyelenggaraan pemilu serta latar belakang seseorang melakukan tindakan tersebut. Tingkah laku atau tindakan individu dalam proses pemberian suara itu meliputi tiga aspek yaitu preferensi (orientasi terhadap isu, orientasi terhadap kualitas personal kandidat, identifikasi partai), aktivitas (keterlibatan dalam partai politik tertentu, keterlibatan dalam setiap kampanye, kehadiran dalam pemungutan suara) dan pilihan terhadap salah satu partai politik tertentu". (Rantelore., 2017).

Perilaku pemilih adalah keputusan masyarakat dengan mengikuti pemilihan kepala daerah. Dengan mengikuti kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi masyarakat dalam menentukan pilihan atau diberikan kesempatan untuk memilih wakil atau pemerintahan yang sesuai dengan pilihannya melalui pemberian suara. Maka hal tersebut dapat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Surbakti (2010) menjelaskan jika perilaku memilih adalah keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum.

Menurut (sari, 2011), memilih merupakan keputusan secara langsung maupun tidak langsung. Memilih adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan siapa yang di anggap cocok untuk menjadi pemimpin kedepannya sesuai dengan keinginan individu maupun baik tertuju pada kalangan atas ataupun mengedepankan kalangan menengah kebawah.

Dalam perilaku pemilih dapat dibedakan menjadi lima pendekatan yang digunakan yakni struktural, pendekatan sosiologis, pendekatan ekologis, pendekatan psikologi dan pendekatan pilihan rasional (Surbakti, 2010). Adapun menurut Dennis Kavanagh bahwa dalam teorinya mengungkapkan ada lima pendekatan sebuah perilaku pemilih yaitu pendekatan struktural, pendekatan sosiologis, pendekatan ekologis, pendekatan psikologis-sosial dan pendekatan rasional (Efriza, 2012).

Perilaku pemilih merupakan realitas sosial politik yang tidak lepas dari pengaruh eksternal dan internal. Dimana secara eksternal perilaku pemilih perempuan mendapat hasil pengaruh dari sosialisasi nilai-nilai dari lingkungannya, sedangkan secara internal perilaku pemilih perempuan mendapat hasil pengaruh dari tindakan yang didasarkan atas rasionalitasnya atau berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Pendekatan-pendekatan secara umum terhadap perilaku pemilih yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan rasional, dan pendekatan psikologis.

Menurut Munjani, Liddle, & Ambardi, (2012) dari konsep perilaku pemilih terdapat tiga model yang mempengaruhi perilaku pemilih seperti yakni

pendekatan sosiologis, pendekatan rasional dan pendekatan psikologis. Pendekatan sosiologis lahir tahun 50-an dalam studi perilaku pemilih di Amerika dan berpusat pada faktor-faktor sosiologis untuk menjelaskan perilaku memilih yakni pada partisipasi dalam pilihan politik. Yang pada tahun 60-an berkembang model psikologi politik yang menekankan pada pentingnya faktor psikologis terutama dari identifikasi diri pemilih dengan partai politik tertentu (identifikasi partai). Lalu pada tahun 70-an model rasional lebih disebut dengan ekonomi-politik yang secara lebih kuat.

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam keaitan dengan konteks sosial. Kongretnya, pemilih seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demokrasi dan sosial ekonomi seperti agama, suku, bangsa, kelas sosial dan pengaruh lingkungan lainnya (Munjani, Liddle, & Ambardi, 2012).

Pendekatan sosiologis secara logis terbagi atas model penjelasan mikrososiologis dan model penjelasan makrososiologis. Model penjelasan mikrososiologis, dikembangkan oleh ilmu politik pendekatan ini juga dikenal dengan sebutan mazhab clumbia. Sementara model makrososiologis menelaah perilaku pemilu di seluruh tingkat atau lapisan masyarakat secara keseluruhan

a. Agama

Studi agama di banyak negara demokrasi merupakan sebuah faktor yang mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan komunitas keagamaan yang tidak politis seperti kegiatan-kegiatan sosial gereja, pengajian, yasinan dan majelis taklim. Masyarakat yang lebih aktif dalam kegiatan sosial keagamaan, cenderung aktif dalam kegiatan sosial non-keagamaan seperti menjadi sukarelawan atau *volunteer* di sekolah-sekolah publik, panti asuhan, drama wanita, kelompok tani, koperasi, kepemudaan, dan sebagainya. Masyarakat yang aktif beranggapan dirinya berada di dalam jaringan sosial yang lebih luas sehingga terdeteksi untuk menjangkau kegiatan politik (Munjani, Liddle, & Ambardi, 2012). Masyarakat mempunyai kesempatan lebih banyak untuk terlibat dalam aktivitas politik dalam jaringan untuk memobilisasi politik, sehingga cenderung lebih terdorong untuk ikut dalam pemilu atau kampanye menjelang pemilu.

Dikutip dari hasil pengamatan menurut Munjani, Liddle, & Ambardi (2012) menganggap bahwa Muslim yang taat terhadap perintah atau anjuran agamanya secara teratur melaksanakan kegiatan ibadah, cenderung lebih aktif dalam kegiatan politik atau setidaknya, tidak ada indikasi hubungan negatif yang signifikan dan konsisten antar komponen religiositas muslim dengan partisipasi politik seperti memilih dalam pemilu atau pilpres (*voting*), partisipasi dalam kampanye, membantu calon atau partai, me-

nyumbang dana pada calon atau partai, serta meyakinkan orang lain agar memilih calon atau partai tertentu.

b. Suku Bangsa

Suku bangsa merupakan sebagian faktor penting sosiologis untuk membentuk perilaku pemilih. Potensi pentingnya faktor sosiologis ini pada perbedaan geografis dengan demografinya (Munjani, 2012). Kecenderungan etnisitas dalam pengaruh signifikan terhadap perilaku pemilih Indonesia, sebagaimana diperkirakan selama ini partai-partai secara umum semakin menasional dilihat dari sebaran kedaerahan maupun suku bangsa pada pemilu seperti dari sosialisasi partai dan semakin panjang umur partai mempunyai kesempatan untuk semakin tersosialisasikan secara nasional.

Suku bangsa atau kedaerahan terhadap partisipasi dan pilihan politik pertama, perbedaan kedaerahan atau suku bangsa sedikit mempunyai pengaruh terhadap partisipasi dalam pemilu. Kedua, perbedaan kedaerahan atau suku bangsa mempunyai pengaruh, pengaruh ini sangat terbatas dan tidak konsisten dari pemilu ke pemilu karena ada gejala bahwa partai-partai utama yang menasional sehingga faktor kedaerahan dan kesukubangsaan kurang mempunyai pengaruh kuat dalam pemilu (Munjani, 2012).

c. Kelas Sosial

Kelas sosial dalam studi perilaku pemilih menurut pendekatan sosiologis dapat dilihat dari indikator sosial-ekonomi seperti pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan (Munjani, 2012).

Studi kelas sosial melalui indikator-indikator dalam partisipasi dan pilihan politik memiliki perbedaan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Partisipasi politik masyarakat perkotaan berpendidikan lebih baik dan memiliki penghasilan lebih baik, pengetahuan dan keahliannya lebih baik dibanding masyarakat pedesaan. Partisipasi politik masyarakat pedesaan memiliki pengetahuan yang sangat kurang. Dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu mobilisasi massa lebih terjangkau karena sarana prasarana di perkotaan lebih besar dan juga lebih paham arti pemilu berkat pendidikan yang umumnya lebih baik. Tetapi masyarakat pedesaan akan lebih banyak mengikuti kegiatan politik untuk memilih calon pemimpin atau partai karena memiliki waktu yang tidak terlalu sibuk dibandingkan masyarakat perkotaan (Munjani, 2012).

Pentingnya pendidikan akan menentukan letak potensi kritis terhadap pemerintah. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat semakin besar kecenderungan untuk berpartisipasi dalam politik (Munjani, Liddle, & Am-bardi, 2012).

2. Pendekatan Rasional

Pada pendekatan ini isu-isu politik menjadi pertimbangan penting para pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan. Melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi, yang di pertimbangkan tidak hanya ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil di harapkan, tetapi juga perbedaan alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan

primiliah dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih, sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk keputusan partai atau yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak memilih (Munjani, Liddle, & Ambardi, 2012).

a. Kalkulasi Untung Rugi

Kalkulasi untung rugi merupakan sebagai tindakan masyarakat untuk mencapai tujuan yang memenuhi atau memuaskan kepentingan yang lebih besar. Seperti yang dikemukakan menurut Munjani, Liddle, & Ambardi (2012) bahwa tindakan warga didasarkan pada motif untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Besar dari ongkos yang dikeluarkan. Kalau bisa mendapatkan sebuah barang tanpa harus keluar ongkos, mengapa harus mengeluarkan ongkos.

Ongkos atau modal tidak mesti dalam bentuk uang atau barang tertentu, tetapi dapat dimaksudkan dalam bentuk tenaga dan waktu. Setiap masyarakat dalam memilih memerlukan modal atau ongkos untuk mendapatkan sebuah hasil yang diinginkan (Munjani, Liddle, & Ambardi, 2012). Memilih atau tidak memilih, masyarakat sama-sama akan mendapatkan hasil pemilu dalam memperoleh keputusan atau kebijakan yang dibuat (Munjani, Liddle, & Ambardi, 2012).

Indikator kalkulasi untung rugi pada pendekatan pilihan rasional menurut Ramlan Surbakti (2010) bahwa kegiatan memilih sebagai kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih,

tetapi kemungkinan suara yang didapat mempengaruhi hasil yang diharapkan. Tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih, kandidat yang berhak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.

b. Visi Dan Misi

Visi dan misi merupakan suatu pernyataan komprehensif tentang segala sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat pada masa yang akan datang dan disebut sebagai pedoman atau arahan tujuan jangka panjang bagi masyarakat.

3. Pendekatan Psikologis

Pendekatan Psikologis berkaitan dengan emosional seseorang terhadap calon, suka atau tidaknya, menarik atau tidaknya calon menentukan perilaku pemilih dengan melihat partai politik, yaitu dengan cara identifikasi partai politik. Dalam hal ini setiap masyarakat memiliki identifikasi sosial yang beragam seperti identitas agama, ras, dan etnis (Munjani, Liddle, dan Ambardi, 2012). Begitupun dalam lingkungan politik, seseorang akan mengidentifikasi dirinya dengan partai politik yang menurut nya sesuai dengan identitasnya. Yang di maksud dengan identifikasi diri dengan partai sendiri adalah orientasi atau afeksi sikap, perasaan seseorang terhadap partai politik dalam sebuah masyarakat (Munjani, Liddle, dan Ambardi, 2012).

Adapun menurut Efriza (2012) ada beberapa faktor psikologis yang mendorong pemilih menentukan pilihannya yaitu: identifikasi partai, orientasi kandidat, dan orientasi isu/tema. Pertama, identifikasi partai digunakan untuk mengukur sejumlah faktor predposisi yang relevan bagi individu. Pengalaman pribadi dan orientasi politik sering diwariskan oleh orang tua, namun dapat pula dipengaruhi oleh lingkungan, ikatan perkawinan, dan situasi kritis.

1. Identifikasi partai dilihat dari kesamaan pandangan respon dengan anggota keluarganya terhadap pilihan tertentu serta adanya kesamaan antara partai yang dipilih dengan partai yang dikagumi.

2. Ketokohan dilihat dari perasaan emosional pemilih yang melandasi pilihannya dengan mempertimbangkan identitas atau ketokohan.

Jenis-jenis pemilih dapat dibagi menjadi beberapa kategori (Firmanzah, 2008) yaitu:

- a. Pemilih Rasional Pemilih jenis ini adalah pemilih yang tidak memperhatikan kedekatan ideology dengan kandidat ataupun partai yang mengusung calon tersebut. Pemilih jenis ini lebih mengedepankan kinerja yang baik dari calon dan hanya mengutamakan apa yang menjadi kemampuan dari calon kandidat dan apakah mereka dapat menjalankan program kerjanya. Pemilih jenis ini yang terpenting adalah apa yang bisa dilakukan oleh kandidat atau kontestan pemilu.
- b. Pemilih Kritis Pemilih yang seperti ini adalah mereka yang selalu menganalisis dan menkritisi kebijakan yang telah dibuat oleh partai atau kontestan. Intinya pemilih jenis ini akan terus menganalisis apa yang

menjadi kebijakan yang ditawarkan kandidat atau partai dan tidak sesuai dengan pemahaman pemilih tersebut maka kebijakan itu akan dikritisi.

- c. **Pemilih Tradisional** Pemilih jenis ini sangat mengedepankan nilai-nilai budaya, asal-usul dan paham dan ini menjadi tolak ukur untuk memilih para kandidat yang mencalonkan pada pemilu. Pemilih ini sangat mudah untuk dipengaruhi dan juga pemilih ini sangat loyal dengan satu kandidat. Karena menurutnya apa yang telah dikatakan kandidat yang menjadi pilihannya itu sudah tidak dapat dibantah lagi.
- d. **Pemilih Skeptis** Pemilih jenis ini adalah pemilih yang paling parah dalam menentukan pilihan calonnya yang dimana pemilih ini jika mereka melakukan pemilihan maka mereka akan memilih secara acak dan mereka berpikiran bahwa siapapun yang mereka pilih itu tidak akan berpengaruh pada mereka ataupun pada kondisi daerahnya.

4. Konsep Partisipasi Politik

Partisipasi diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan. Lebih lanjut dijelaskan partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan. Pada dasarnya partisipasi dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi yang bersifat swakarsa dan partisipasi yang bersifat simobilisasikan. Partisipasi swakarsa mengandung arti bahwa keikutsertaan dan peran sertanya atas dasar kesadaran dan kemauan sendiri, sementara partisipasi yang dimobilisasikan memiliki arti keikutsertaan dan berperan serta atas dasar pengaruh orang lain (Aftah, 2017).

Syarat utama warga Negara disebut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara dan pemerintahan, yaitu :

- a. Ada rasa sukarela (tanpa paksaan)
- b. Ada keterlibatan secara emosional
- c. Memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya

Dari pengertian partisipasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa partisipasi tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat nyata secara fisik tetapi juga dapat menyangkut hal-hal yang bersifat non-fisik seperti buah pikiran, ide, keterampilan serta keterlibatan mental dan emosional individu dalam suatu kelompok. (Aftah, 2017).

Secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi: partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan (Akbar, 2017).

Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadapi

Syarat utama warga Negara disebut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara dan berpemerintahan, yaitu :

- a. Ada rasa sukarela (tanpa paksaan)
- b. Ada keterlibatan secara emosional
- c. Memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya.

Dari pengertian partisipasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa partisipasi tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat nyata secara fisik tetapi juga dapat menyangkut hal-hal yang bersifat non-fisik seperti buah pikiran, ide, keterampilan serta keterlibatan mental dan emosional individu dalam suatu kelompok (Aftah, 2017).

Secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi: partisipasi aktif yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan (Akbar, 2017).

Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadapi

rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya (Bantarani, 2019)

Membedakan Partisipasi politik menjadi beberapa kategori yakni politik apatis orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Partisipasi politik spektor orang yang sedikit-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Partisipasi politik gladiator mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat. Partisipasi politik pengritik Orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa orientasi partisipasi politik aktif terletak pada input dan output politik. Sedangkan partisipasi pasif terletak pada outputnya saja. Selain itu juga ada anggapan masyarakat dari sistem politik yang ada dinilai menyimpang dari apa yang dicita-citakan sehingga lebih menjurus kedalam partisipasi politik yang apatis. Pemberian suara dalam pilbup merupakan salah satu wujud partisipasi dalam politik yang terbiasa. Kegiatan ini walaupun hanya pemberian suara, namun juga menyangkut semboyan yang diberikan dalam kampanye, bekerja dalam membantu pemilihan, membantu tempat pemungutan suara dan lain-lain. Milbrath dan Goel yang dikutip oleh (Kawengian, 2017)

Merujuk pada tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah (sistem politik menjadi empat tipe yaitu partisipasi aktif,

partisipasi pasif tertekan (apatis), partisipasi militan radikal, dan partisipasi pasif. Tinggi atau rendahnya partisipasi politik masyarakat merupakan suatu akibat dari kegiatan politik dan tidak berdiri sendiri. Keberlangsungan tingkat partisipasi politik masyarakat didukung oleh banyak faktor, di antaranya adalah faktor kesadaran politik. Melalui kesadaran politik.

Partisipasi aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Sebaliknya jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politiknya cenderung pasif tertekan (apatis). Partisipasi militan radikal terjadi apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Dan apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif). Partisipasi politik yang terjadi di berbagai Negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan nonkonvensional termasuk yang mungkin legal (petisi) maupun ilegal (cara kekerasan atau revolusi).

a. Sifat-Sifat Partisipasi Politik

Menurut Huntington dan Nelson sebagaimana dikutip Budiardjo partisipasi politik dapat bersifat Otonomi dan Mobilisasi.

- a. Partisipasi politik yang bersifat Otonom (*Autonomous Participation*) yaitu partisipasi politik yang didasarkan pada kesadaran politik setiap warga untuk menentukan pilihan.

- b. Partisipasi politik yang bersifat Mobilisasi (*Mobilized Participation*) yaitu partisipasi politik yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain.

C. Tipologi Partisipasi Politik

Menurut (Jayawinangun & Valdiani, 2011.) tipologi partisipasi politik sebagai kegiatan dibedakan menjadi :

- a. Partisipasi Aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya setiap warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan public mengajukan alternative kebijakan publik yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain-lain.
- b. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
- c. Golongan putih (Golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang dicita-citakan.

Adapun menurut (A.Rahman,2007:127) ada beberapa sebab orang untuk tidak memilih (golput), diantaranya adalah :

- a. Golput teknis, hal ini dikarenakan sifat teknis tertentu (seperti keluarga meninggal, ketiduran dan lain-lain) berhalangan hadir

ketempat pemungutan suara karena sakit, keluar kota, bekerja, dan cuaca buruk.

- b. Golput politis, hal ini untuk masyarakat yang tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau pesimistis bahwa pemilu/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan, serta tidak ada sosialisasi tentang visi dan misi kandidat sehingga pemilih tidak memahami isi, visi dan misi kandidat.

c. Bentuk Bentuk Partisipasi Politik

Menurut (Kesuma, 2020), salah satu cara untuk mengetahui kualitas partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari bentuk – bentuk keterlibatan seseorang sebagai tahap proses pembangunan yang terencana mulai dari perumusan tujuan sampai dengan penilaian. Bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh warga masyarakat untuk mempengaruhi bentuk dan jalan *public policy*. Sehingga kualitas dari hierarki partisipasi politik masyarakat dilihat dalam keaktifan atau kefasipan (apatis) dari bentuk partisipasi politik masyarakat.

Menurut (Diantara, 2020) membedakan partisipasi politik masyarakat dalam dua bentuk yaitu:

- a. Partisipasi politik konvensional, sebuah bentuk partisipasi politik masyarakat yang “normal” dalam demokrasi modern.
- b. Partisipasi politik non Konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik masyarakat yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Sementara itu menurut (Diantara, 2020) membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori:

- a. Apatis adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- b. Spektator adalah orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu.
- c. Gladiator adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik misalnya komunikator, aktivis partai dan aktivis masyarakat.
- d. Pengritik adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.
- e. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik
- f. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik
- g. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dsb
- h. Partisipasi dalam diskusi politik internal
- i. Partisipasi dalam pemungutan suara

D. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik

Menurut (Sihite, 2018) faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi yang otonom adalah :

- a. Kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara hal ini menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan dan politik tempat ia hidup. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik.

b. Kepercayaan terhadap pemerintah yaitu penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya atau tidak. Apabila pemerintah sebelumnya dianggap tidak dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, maka pada pemilihan politik selanjutnya akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu pada adapun tahapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu:

- a. Tahapan Persiapan
- b. Tahapan Pelaksanaan
- c. Tahapan Penyelesaian

Konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik. Kalau timbul kompetisi memperebutkan kekuasaan, strategi yang biasanya digunakan oleh kelompok-kelompok yang saling berhadapan adalah mencari dukungan rakyat. Dalam hal ini mereka tentu menganggap sah dan memperjuangkan idea-idea partisipasi massa dan akibatnya menimbulkan gerakan-gerakan yang menuntut agar "hak-hak" ini dipenuhi. Jadi kelas-kelas menengah dalam perjuangannya melawan kaum aristokrat telah menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat (Rahma, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang juga sangat mempengaruhi partisipasi politik adalah :

- a. Tingkat pendidikan
- b. Jenis kelamin
- c. Status sosial ekonomi seseorang

- d. Peran partai politik
- e. Aktivitas kampanye
- f. Calon-calon/tokoh politik yang memiliki daya tarik pribadi kuat (kharismatis).

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian terkait teori dalam beberapa konsep yang telah dikemukakan penulis sebelumnya terkait pengaruh perilaku terhadap perilaku pemilih perempuan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, merujuk pada hal yang dikarenakan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Perilaku pemilih perempuan adalah keputusan pemilih perempuan berdasarkan DPT yang ditentukan oleh KPU untuk menentukan sebuah pilihan. Pemilih yang memiliki hak pilih ditekankan pada tanggung jawab masing-masing untuk membangun kemandirian, kesadaran, merumuskan dan mengekspresikan pilihannya menurut keinginan setiap individu.

Bagan Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Dengan melihat latar belakang yang dirumuskan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai perilaku pemilih perempuan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih perempuan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.

E. Deskriptif Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan penulis, kemudian akan di dekskripsikan seperti berikut:

1. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang melihat karakteristik sosial masyarakat Kelurahan Bonto Kamase Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, lebih menekankan pada variable pengelompokan sosial dalam melihat perilaku pemilih.
2. Pendekatan rasional adalah berkaitan dengan orientasi utama pemilih, yakni orientasi isu dan orientasi kandidat.
3. Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi tim penyelenggara pilkada terhadap identitas partai, seperti NASDEM, PKS, PPP dan PDI yang kemudian akan mempengaruhi sikap masyarakat Bulukumba, khususnya Kelurahan Bonto Kamase dalam memutuskan calon atau sikap seseorang terhadap isu-isu yang berkembang.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih, diantaranya faktor pendukung masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah pemilih perempuan yang terlibat aktif dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020. Adapun faktor penghambat adalah peristiwa-peristiwa tertentu seperti berada diluar daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan lokasi penelitian bertempat di kantor Kpu, Bawaslu, Camat Herlang, Kepala Desa Se- Kecamatan di Kabupaten Bulukumba. Judul penelitian "Perilaku pemilih perempuan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini akan dilakukan pada 2 bulan tentatif setelah seminar proposal.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif adalah Sesuai dengan masalah yang ditulis pada penelitian, khususnya yang berhubungan dengan yang terjadi sekarang, maka dasar-dasar yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif, dalam penulisan berdasarkan suatu metode. Metode tersebut dapat lebih mengarahkan penyusun dalam melakukan penulisan dan pengamatan, merupakan sebuah pedoman dan acuan metode deskriptis dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan suatu masalah yang dihadapi, menjelaskan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (grounded theory) dan

menjelaskan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi oleh penelitian di lapangan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman informan. Masalah yang akan diteliti terkait Perilaku pemilih perempuan dalam pemilihan kepala daerah Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer, yaitu data empiris yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan yang ada di lapangan.
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan peneliti yang sumbernya dari data-daya yang sudah sebelumnya mendai perangkat informasi dalam bentuk dokumen, laporan-aporan, dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai keterangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan penelitian ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian. Dimana informan ini diharapkan memberikan data secara obyektif,

netral dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun informan dari penelitian perilaku pemilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Informan Penelitian

NO.	Nama Informan	Inisial	Jabatan	Jumlah
1.	Syamsul, SE	SY	Anggota KPU	1
2.	Abdul Rahman, S.Pd, MH	AR	Anggota Bawaslu	1
3.	Ariani, SH	AN	Kepala Camat Herlang	1
4.	Jumaliah Rahiman	JR	Masyarakat Desa Bonto Kamase	1
5.	Rahmawati Haris	RH	Masyarakat Desa Bonto Kamase	1
6.	Samsina Juswar	SJ	Masyarakat Desa Bonto Kamase	1

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian melakukan jenis penelitaia kualitatif, dengan melakukan pengumpulan data berdasarkan sesuai dengan kondisi alamiah yang sesuai dengan dokumentasi. Metode dasar yang di gunakan sesuai peneliti ini dalam hal-hal mengumpul informan diantaranya obsrervasi atau pengamatan langsung dilapangan (Observasi) atau wawancara mendalam dan serta dokumentasi.

1. Teknik Observasi

Teknik ini dilakukan penelitian dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap upaya yang terkait dengan perilaku pemilih perempuan dalam pilkada kecamatan herlang kabupaten bulukumba. kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat.

2. Wawancara

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap berbagai informan kepala dan staf pegawai Telkom atau masyarakat sekitar.

3. Dokumentasi

Teknik ini merupakan data melalui dokumen, buku atau hasil-hasil penelitian yang relevan yang saling berkaitan perilaku pemilih dalam partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. Sehingga menunjang kerelevanan data. Metode dokumentasi digunakan untuk mengungkap serta melengkapi informasi yang erat kaitannya dengan pokok dari pembahasan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah langkah selanjutnya dalam pengelolaan data, dimana data yang didapat, dikerjakan, dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat

3 Teknik Analisis Data. Adapun beberapa teknik analisis data didalamnya yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reducation*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting. Reduksi data juga berarti komponen pertama dalam analisis data yang memperpendek, mempertegas dan membuang hal yang dirasa tidak penting ataupun tidak berkaitan dengan fokus penelitian sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah bentuk rakitan data dalam uraian singkat. Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu bersifat naratif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi secara lebih mudah.

3. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah penelitian ada di lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas.

G. Teknik Keabsahan Data

Dalam pengabsahan data dari penelitian ini adalah Triangulasi yaitu sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik dan sumber data yang ada. Triangulasi terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah bukan hanya sumber atau teknik yang sering mempengaruhi kredibilitas data tapi juga triangulasi waktu. Data yang didapatkan dari sumber bervariasi dan berbeda seperti pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara yang dilakukan di pagi hari saat narasumber masih segar, belum adanya masalah, dan memberikan informasi yang akurat agar informasi yang diberikan semakin

menyakinkan. Oleh karena itu dalam hal ini penguji kreabilitas data dapat dilaksanakan dengan melakukan pengecekan melalui wawancara, obsevasi, atau teknik lain waktu atau situasi yang berbeda.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKAI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Wilayah Penelitian

Kecamatan Herlang merupakan salah satu Kecamatan dari 10 kecamatan Kabupaten Bulukumba yang di mana dulunya merupakan suatu distrik dari Hero dan Lange-Lange. Kecamatan ini berada di pesisir timur dari provinsi Sulawesi Selatan, dan adapun batas-batasnya yaitu:

1. Utara : Kecamatan Kajang
2. Timur : Teluk Bone
3. Selatan : Kecamatan Bonto Tiro
4. Barat : Kecamatan Ujung Loe

a. Geografi dan Administrasi

Secara geografis Kecamatan Herlang Berada di lintang $5^{\circ}21'38.61''$ LS sampai $5^{\circ}27'8.79''$ LS dan $120^{\circ}18'29.12''$ BB sampai $120^{\circ}26'3.15''$ BB. Dengan ibu Kota Kecamatan Tanuntung yang berada di Kelurahan Tanuntung.

Adapun luas Kecamatan Herlang yaitu 6.879 Ha dimana 6,4% beradasa pada ketinggian 0-25 m dpl, 57-28% yang berada di ketinggian 25-100 m dpl., dan 36,25% yang berada pada Ketinggian 100-500 m dpl. Sedangkan untuk kemiringan lerengnya memiliki variasi yaitu mulai dari 0 % sampai lebih besar dari 40%.

Daerah ini merupakan salah satu produsen jagung, selain itu Kecamatan ini juga memiliki tempat wisata yaitu pantai turungan beru di tanuntung dan rumah adat Saoraja di Borong.

Gambar 4.1

Kecamatan Herlang



Luas wilayah Kecamatan Herlang yaitu seluas 68,78 km², terbagi dalam 6 Desa dan 2 Kelurahan berdasarkan kemiringan lereng, wilayah Kabupaten Bulukumba terbagi kriteria morfolofis yaitu datar dengan kemiringan 0-20 seluas 26,64%.

Tabel 4.1

**Luas Wilayah, Status dan Klasifikasi Menurut Desa dan
Kelurahan Di Kecamatan Herlang , 2020**

No.	Nama Desa dan Kelurahan	Luas Wilayah (Km2)	Status	Klasifikasi
1.	Desa Karassing	10.25	Desa	Swakarya
2.	Desa Borong	8.05	Desa	Swakarya
3.	Kelurahan Bonto Kamase	8.75	Kelurahan	Swakarya
4.	Kelurahan Tanuntung	10.63	Kelurahan	Swasembada
5.	Desa Singa	9.00	Desa	Swasembada
6.	Desa Tugondeng	10.28	Desa	Swakarya
7.	Desa Pataro	6.00	Desa	Swakarya
8.	Desa Gunturu	5.83	Desa	Swasembada
Herlang		68.79		

Sumber: KASI PMD Kecamatan Herlang

b. Keadaan Demografis

Penduduk di Kecamatan Herlang pada tahun 2020 sebesar 24.663 jiwa

. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2020 terdiri dari laki-laki sebanyak 11.200 jiwa dan perempuan 13.463 jiwa.

Tabel.4.2

Jumlah Penduduk di Kecamatan Herlang

NO.	Nama Desa dan Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Desa Karassing	1.150	1.387	2.537
2.	Desa Botong	1.182	1.444	2.626
3.	Kelurahan Bonto Kamase	1.704	2.133	3.897
4.	Kelurahan Tanuntung	1.389	1.683	3.072
5.	Desa Singa	1.500	1.867	3.367
6.	Desa Tugondeng	1.522	1.790	3.312
7.	Desa Pataro	991	1.164	2.155
8.	Desa Gunnturu	1.702	1.995	3.697
	Jumlah	11.200	13.463	24.663

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba

1. Gambaran Umum Kecamatan Herlang

Kerajaan Herlang adalah Kerajaan di Sulawesi, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan. Berdiri abat ke -16 Kerajaan Hero dan Langnge-lange, penggabungan kedua nama menjadi asal muasalah kerajaan Herlang. Terdapat beberapa kerajaan kecil di daerah suku konjo,disebut kerajaan kecil karena tidak sebesar kerajaan gowa dan bone.

Pada awal abad ke- 16 adalah awal berkembangnya sebuah kekuatan pada kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Bulukumba baik dari segi ekonomi, pertanian serta, dapat menjalankan kekuasaannya dengan begitu baik sebagai penguasa kerajaan. Hanya ancaman dan tantangan sering datang dan pergi. Kerajaan yang ada di Bulukumba adalah kajang Amma toa. Setelah kerajaan berdiri mulailah aturan adat dan budayakan ini yang terjadi di kerajaan kajang. Dan ada beberapa kerajaan kecil yang ada di Bulukumba perlu kita tahu bahwa sebelum nama Bulukumba ada kerajaan kecil ini sudah ada terlebih dahulu, penamaan Bulukumba baru di bentuk setelah adanya pertentangan antara kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone.

Beberapa kerajaan kecil ada di Bulukumba yaitu:

1. Kerajaan Tanete
2. Kerajaan (Gantaran) Kindang
3. Kerajaan Hero
4. Kerajaan Langnge-Langnge
5. Kerajaan Herlang
6. Kerajaan Ujung Loe
7. Kerajaan Ara Bontobahari
8. Kerajaan Kajang
9. Kerajaan Tiro

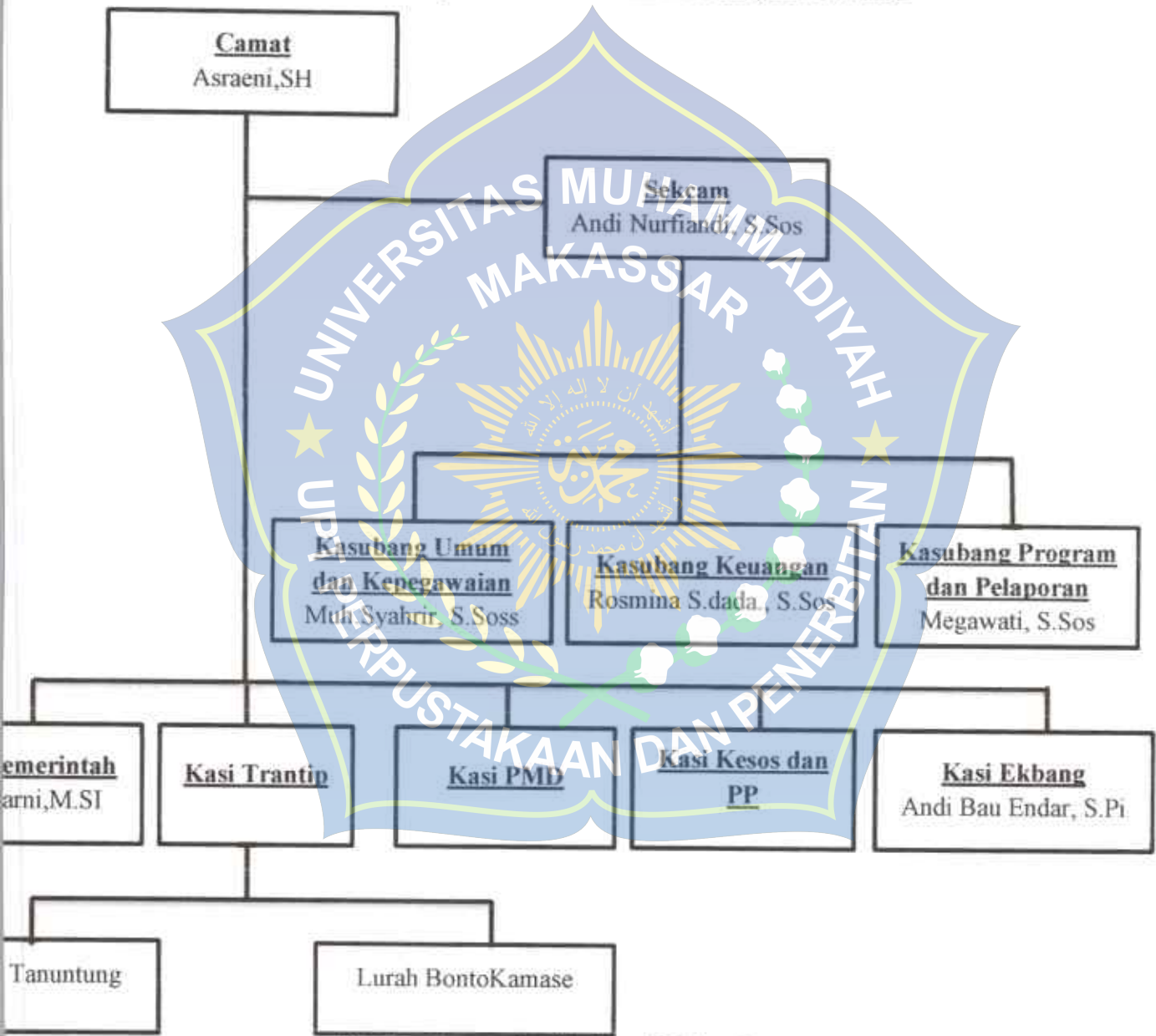
Diabad ka-16 dimasa itu kerajaan bone dan kerajaan gowa bertikai dalam perebutan wilayah kekuasaan yaitu daerah bangkeng buki', yang ada di wilayah Bulukumba sekarang. Akhirnya kedua kerajaan ini kembali serta mendukung para raja yang ada di Bulukumba tetap mempertahankan dan menjaga wilayah kekuasaan mereka. Karena mereka sudah tahu kelicikan belanda dan para sekutunya, meraka mengadu domba raja-raja supaya saling bertikai. Karena belanda berpikir jika semua kerajaan bersatu maka ssemakin sulit untuk di kuasai.



2. Struktur Organisasi

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Kecamatan Herlang Bulukumba



Sumber: Kecamatan Herlang Bulukumba

B. Hasil Penelitian

Perilaku pemilih adalah keputusan masyarakat dengan mengikuti pemilihan kepala daerah. Dengan mengikuti kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi masyarakat dalam menentukan pilihan atau diberikan kesempatan untuk memilih wakil atau pemerintahan yang sesuai dengan pilihannya melalui pemberian suara. Maka hal tersebut dapat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sunbakti (2010).

Tabel 4.3
Data Pemilihan Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di KPU Bulukumba

No.	Nama Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-Laki	Perempuan	Total
		54	9808	1120	21011
1.	Kel. Tugondeng	7	1210	1413	2623
2.	Kel. Bonto Kamase	9	1531	1722	3253
3.	Desa Karassing	6	1086	1255	2341
4.	Desa Singa	6	1283	1457	2740
5.	Desa Gunturu	8	1410	1650	3060
6.	Desa Borong	5	957	1101	2058
7.	Desa Tugondeng	8	1440	1613	3053
8.	Desa Pataro	5	891	992	1883

Sumber: KPU Bulukumba

Berdasarkan data pemilihan tetap Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bulukumba karena masyarakat Kelurahan Bonto Kamase di Kecamatan Herlang sudah dikatakan antusias dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

1. Perilaku Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.

Perilaku pemilih diartikan dengan pernyataan sebagai "perilaku pemilih adalah tingkah laku atau tindakan individu dalam proses pemberian suara dalam penyelenggaraan pemilu serta latar belakang seseorang melakukan tindakan tersebut. Tingkah laku atau tindakan individu dalam proses pemberian suara itu meliputi tiga aspek yaitu preferensi (orientasi terhadap isu, orientasi terhadap kualitas personal kandidat, identifikasi partai), aktivitas (keterlibatan dalam partai politik tertentu, keterlibatan dalam setiap kampanye, kehadiran dalam pemungutan suara) dan pilihan terhadap salah satu partai politik tertentu" (Rantelore., 2017).

Perilaku pemilih adalah keputusan masyarakat dengan mengikuti pemilihan kepala daerah. Dengan mengikuti kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi masyarakat dalam menentukan pilihan atau diberikan kesempatan untuk memilih wakil atau pemerintahan yang sesuai dengan pilihannya melalui pemberian suara. Maka hal tersebut dapat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Surbakti (2010) menjelaskan jika perilaku memilih adalah keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian

kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum.

Pemilihan kepala daerah merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pilkada salah satu prinsip demokrasi ini dapat mewujudkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan untuk menentukan kebijakan kenegaraan. Melalui pilkada masyarakat sebagai peserta pemilih, yang selanjutnya membawa perubahan untuk melahirkan pemimpin selanjutnya.

Adapun beberapa indikator perilaku pemilih perempuan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Menurut Ramlan Subakti (2010) yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis, perilaku pemilih dilihat dari pendekatan sosiologi pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih seseorang. Karakteristik atau latar belakang sosiologis (seperti agama, suku bangsa, kelas sosial dsb) merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan politik.

Disisi lain terdapat faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih perempuan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. mereka menjatuhkan pilihannya karena faktor ke agama. Berikut jawaban mereka ketika diwawancarai terkait apa alasan mereka memilih calon kepala daerah tersebut.

a. Agama

Studi agama di banyak negara demokrasi merupakan sebuah faktor yang mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan komunitas keagamaan yang tidak politis seperti kegiatan-kegiatan sosial gereja, pengajian, yasinan dan majelis taklim.

Masyarakat yang lebih aktif dalam kegiatan sosial keagamaan, cenderung aktif dalam kegiatan sosial non-keagamaan seperti menjadi sukarelawan atau *volunteer* di sekolah-sekolah publik, panti asuhan, drama wanita, kelompok tani, koperasi, kepemudaan, dan sebagainya. Masyarakat yang aktif beranggapan dirinya berada di dalam jaringan sosial yang lebih luas sehingga terdeteksi untuk menjangkau kegiatan politik (Munjani, Liddle, & Ambardi, 2012).

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota KPU Kabupaten Bulukumba, terkait pendekatan sosiologis yang mengatakan bahwa:

“Selain itu saya jelas disini saya melihat apa agama atau keyaninan suatu calon, agar saya dapat menentukan pilihan saya dan calon yang akan dipilih. Selain itu masyarakat juga melihat pola pikir suatu calon dan bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya. (Hasil wawancara bersama SY pada tanggal 25 November 2021 pada jam 12.34)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat memperhatikan apa agama dan keyakinan calon dan masyarakat akan menentukan pilihannya siapa mereka pilih. Dan bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Bonto Kamase, terkait pendekatan sosiologis yang mengatakan bahwa:

“ Saya memilih calon karena sosok pemimpin yang baik dan juga seorang alim ulama, agar Kabupaten Bulukumba ini lebih maju dan berkah dengan di pimpin.

(Hasil wawancara bersama JR pada tanggal 20 November 2021 pada jam 08.34)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Bonto Kamase tidak hanya juga melihat dari segi ahlak dan karakter agama.

Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Bonto Kamase, terkait pendekatan sosiologis yang mengatakan bahwa:

“ Saya ikut memilih karna saya melihat agama dan keyakinan suatu calon dalam pemilihan kepala daerah dan memilih sosok pemimpin yang bijaksana, baik dan dapat bertanggung jawab”

(Hasil wawancara bersama SJ pada tanggal 20 November 2021 pada jam 08.34)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan sosok pemimpin yang bijaksana, dan dapat bertanggung jawab

b. Suku Bangsa

Suku bangsa atau kedaerahan terhadap partisipasi dan pilihan politik *pertama*, perbedaan kedaerahan atau suku bangsa sedikit mempunyai pengaruh terhadap partisipasi dalam pemilu. *Kedua*, perbedaan kedaerahan atau suku bangsa mempunyai pengaruh, pengaruh ini sangat terbatas dan tidak konsisten dari pemilu ke pemilu karena ada gejala bahwa partai-partai utama yang

menasional sehingga faktor kedaerahan dan kesukubangsaan kurang mempunyai pengaruh kuat dalam pemilu (Munjani, 2012).

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Bulukumba, terkait pendekatan sosiologis yang mengatakan bahwa:

“ Menurut saya dalam pemilihan kepala daerah perlu kita ketahui bahwa kita melihat dari suku bangsa mana calon yang akan kita pilih agar kita memperoleh pemimpin yang dapat bertanggung jawab dalam suatu negara”.

(Hasil wawancara bersama AR pada tanggal 25 November 2021 pada pukul 10.59)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat memperhatikan suku bangsa man calon tersebut. Agar kelak calon tersebut terpilih dapat bertanggung jawab dalam memimpin suatu negara sendiri.

Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Bonto Kamase, terkait pendekatan sosiologis yang mengatakan bahwa:

“ Menurut saya suku dari seorang calon perlu kita ketahui dari mana dia berasal. Agar masyarakat dapat memilih calon yang mereka pilih dan bisa bertanggung jawab jika kelak ia terpilih dan dapat bertanggung jawab kepada masyarakatnya. (Hasil wawancara bersama JR pada tanggal 28 November 2020 pada pukul 08.34)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat memperhatikan suku bangsa dan masyarakat mengharapkan calon kepala daerah dapat bertanggung jawab kepada masyarakat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Bonto Kamase, terkait pendekatan sosiologis yang mengatakan bahwa:

“ menurut saya suku bangsa sangat perlu kita ketahui kepada calon kepala daerah karna calon yang kita pilih agar memperoleh pemimpin yang bijaksana” (Hasil wawancara bersama SJ pada tanggal 28 November 2020 pada pukul

c. Kelas Sosial

Kelas sosial melalui indikator-indikator dalam partisipasi dan pilihan politik memiliki perbedaan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Partisipasi politik masyarakat perkotaan berpendidikan lebih baik dan memiliki penghasilan lebih baik, pengetahuan dan keahliannya lebih baik dibanding masyarakat pedesaan.

Pentingnya pendidikan akan menentukan letak potensi kritis terhadap pemerintah. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat semakin besar kecenderungan untuk berpartisipasi dalam politik (Munjani, Liddle, & Ambardi, 2012).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Camat Herlang, terkait pendekatan sosiologis yang mengatakan bahwa:

“ Saya melihat tingkat pendidikan suatu calon dalam hal ini menentukan pilihan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Dan dapat mempengaruhi cara berfikir seseorang makanya saya memperhtikan tingkat pendidikan calon.

(Hasil wawancara bersama AN pada tanggal 27 November 2021 pada jam 08.59)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan status calon masyarakat sangat memperhatikan tingkat pendidikan suatu calon dan keyakinan suatu calon. Tingkat pendidikan suatu calon akan membentuk pola pikir yang hebat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat Bonto Kamase, terkait pendekatan sosiologis yang mengatakan bahwa:

“tidak perlu tingkat pendidikan yang tinggi intinya pada saat calon terpilih nantinya dapat membuat masyarakat sejahtera. Dan yang penting calon baik dan jujur dan tidak korupsi.”
(Hasil wawancara bersama JR pada tanggal 28 November 2021 pada jam 08.37)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa apa bila calon terpilih nantinya harus baik, jujur, bertanggung jawab dan tidak melakukan yang namanya korupsi.

Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat Bonto Kamase, terkait pendekatan sosiologis yang mengatakan bahwa:

“tidak dapat di pungkiri bahwa tingkat Pendidikan seseorang dapat memberikan suatu karakter tersendiri, tapi dalam hal ini saya memilih tidak terlalu memperhatikan tingkat Pendidikan calon, tapi saya meloihat calon karena saya sudah tahu rekam jejak calon tersebut”. (Hasil wawancara bersama RH pada tanggal 28 November 2021 pada jam 12.17)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa Pendidikan yang tinggi dari calon tidak terlalu berpengaruh kepada masyarakat dapat dilihat bahwa responden pemilih calon sudah tahu rekam jejak dari calon yang dipilih dalam pemilihan kepala daerah.

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Kelurahan Bonto Kamase dalam pendekatan sosiologis yaitu masyarakat memilih calon kepala daerah melihat dari segi pendidikan suatu calon. Karena pendidikan suatu calon akan membentuk pola pikir yang sehat. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat semakin besar kecenderungan untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

2. Pendekatan Rasional

Pada pendekatan ini isu-isu politik menjadi pertimbangan penting para pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan. Melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi, yang di pertimbangkan tidak hanya ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil di harapkan, tetapi juga perbedaan alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih, sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk keputusan partai atau yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak memilih.

a. Kalkulasi Untung Rugi

Kalkulasi untung rugi merupakan sebagai tindakan masyarakat untuk mencapai tujuan yang memenuhi atau memuaskan kepentingan yang lebih besar. Seperti yang dikemukakan menurut Munjani, Liddle, & Ambardi (2012) bahwa tindakan warga didasarkan pada motif untuk mendapatkan keuntungan

sebesar-besarnya. Besar dari ongkos yang dikeluarkan. Kalau bisa mendapatkan sebuah barang tanpa harus keluar ongkos, mengapa harus mengeluarkan ongkos.

Ongkos atau modal tidak mesti dalam bentuk uang atau barang tertentu, tetapi dapat dimaksudkan dalam bentuk tenaga dan waktu. Setiap masyarakat dalam memilih memerlukan modal atau ongkos untuk mendapatkan sebuah hasil yang diinginkan (Munjani, Liddle, & Ambardi, 2012). Memilih atau tidak memilih, masyarakat sama-sama akan mendapatkan hasil pemilu dalam memperoleh keputusan atau kebijakan yang dibuat (Munjani, Liddle, & Ambardi, 2012).

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota KPU Bulukumba, terkait pendekatan rasdional yang mengatakan bahwa:

"Saya memilih calon kemarin yang betul-betul tidak mengeluarkan yang namanya money politik, karena untuk apa memilih orang yang berbuat hal tersebut dan pada saat terpilih nantinya maka kita akan dihabisi, artinya dia akan berusaha mengembalikan modal yang telah dikeluarkan pada saat pencairan suara atau pada saat menjadi calon kepala daerah, hal tersebut dapat merugikan diri sendiri, orang lain dan bangsa kita sendiri. Dampak praktik seperti itu sangat buruk terhadap kualitas dan keberlangsungan demokrasi lantaran dapat menghilangkan elemen penting dari demokrasi yakni prinsip keadilan, maka jika hal tersebut terjadi hanya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang hanya bermodalkan uang namun miskin pengalaman dan prestasi".

(Hasil wawancara bersama SY pada tanggal 25 November 2021 pada jam 12.34)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa masyarakat memilih calon kepala daerah bukan berdasarkan atas uang, akan tetapi karena kandidat tersebut memang layak untuk dipilih, kandidat yang selalu bermain dengan uang untuk mendapatkan suara hanya akan melahirkan pemimpin yang miskin pengalaman dan prestasi, sehingga berdampak buruk dan pada akhirnya masyarakat yang akan dirugikan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan anggota Bawashu Bulukumba, terkait pendekatan rasional yang mengatakan bahwa:

"Tidak karena semua itu hanya sementara dalam politik, selain itu perbuatan dosa. Saya tidak mau di pimpin dengan orang yang salah hanya karena uang, secara pribadi saya memilih caleg berdasarkan reputasinya, jika sebelumnya sudah dikenal santun, baik, wibawa maka saya percaya tanpa menjanjikan apapun akan melakukan yang terbaik karena ia menjaga Amanah rakyat yang mempercayainya". (Hasil wawancara bersama AR pada tanggal 25 November 2021 pada jam 10.59)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pemilih tidak melakukan pemilihan dikarenakan mereka diberi upah menurutnya selain itu perbuatan dosa itu juga merusak pemerintahan kedepannya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Bonto Kamase, terkait pendekatan rasional yang mengatakan bahwa:

"Menurut saya, tidak ada istilahnya money politik, jadi saya memilih benar-benar dari hati nurani, saya fikir itu termasuk proses yang sudah benar" (Hasil wawancara bersama pada tanggal 25 November 2021 pada jam 10.39)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Bonto Kamase memang betul-betul memilih pemimpin yang bebab- benar pilihan murni dari masyarakat tersebut.

a. Visi dan Misi

Visi dan misi merupakan suatu pernyataan komprehensif tentang segala sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat pada masa yang akan datang dan disebut sebagai pedoman atau arahan tujuan jangka panjang bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Bonto Kamase, terkait pendekatan rasional yang mengatakan bahwa:

“visi misi dan programnya menurut saya mempunyai mekanisme yang baik dengan yang lain, yaitu yang pertama adalah melihat kampanye yang tertib calon kandidat di lapangan dan respon masyarakat baik juga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa masyarakat memilih pemimpin dengan melihat visi dan misin calon kepala daerah karena masyarakat melihat kampanye yang tertib dan dilapangan banyak masyarakat yang merospon dengan baik.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Camat Herlang, terkait pendekatan rasional yang mengatakan bahwa:

“Jelas kita melihat visi dan misi bakal calon, alasannya karena dari visi dan misi lah kita bisa memilih bakal calon yang sesuai dengan yang kita inginkan, hal tersebut penting untuk menyakinkan masyarakat apa-apa saja yang bisa diperkuat kedepannya dengan program-programnya. Suatu hal dalam memilih suatu calon melalui visi dan misinya, apa bila visi dan misinya dapat membawah perubahan dalam masyarakat bukan

hanya janji yang melilit tapi tidak terbukti, dengan begitu kita dapat memilih dengan jelas”.

(Hasil wawancara bersama AN pada tanggal 20 November 2021 pada jam 08.39)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pemilih memang sangat menginginkan visi dan misi yang jelas dari bakal calon tersebut, beserta program-program yang akan dijalankan setelah terpilih. Dengan begitu akan jelas pula arah kepemimpinan kedepannya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Bonto Kamase, terkait pendekatan rasional yang mengatakan bahwa:

“ Yang jelas dengan adanya visi dan misi calon, kita dapat melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh calon yang akan terpilih. Dengan adanya program-program calon pastinya akan sangat berpengaruh dengan terpilihnya suatu calon”.

(Hasil wawancara bersama JR pada tanggal 20 November 2020 pada pukul 08.34)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pemilih memang sangat meningkatkan visi dan misi yang jelas dari calon, beserta program-program yang akan dijalankan setelah terpilih. Dengan begitu akan jelas pula arah kepemimpinan itu kedepannya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Bonto Kamase, terkait pendekatan rasional yang mengatakan bahwa:

“ Jelas kita harus melihat visi dan misi bakal calon, alasannya karena visi dan misi lah kita bisa dapat memilih bakal calon yang sesuai dengan yang kita inginkan, hal tersebut penting untuk meyakinkan masyarakat apa-apa saja yang bisa diperbuat kedepannya dengan program-programnya. Suatu hal yang pasti dalam memilih suatu calon kepala daerah melalui visi dan misinya, apabila visi dan misinya membawahkan perubahan dalam masyarakat bukan hanya janji yang melilit tapi tak bukti dengan begitu kita dapat melihat dengan jelas.

(Hasil wawancara bersama JR pada tanggal 20 November 2020 pada pukul 12.17)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya visi dan misi dari calon, karena pemilih mengambil patokan untuk memilih melihat berdasarkan visi misi dari calon. Apa lagi jika visi itu direalisasikan dan dapat merubah keadaan menjadi lebih baik.

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Kelurahan Bonto Kamase dalam pendekatan rasional masyarakat melihat dari visi dan misi suatu calon. Karena masyarakat sangat meningkatkan visi dan misi yang jelas dari calon tersebut beserta program-program yang akan dijalankan dengan begitu akan jelas arah kepemimpinan kedepannya.

3. Pendekatan Psikologis

Pendekatan Psikologis berkaitan dengan emosional seseorang terhadap calon, suka atau tidaknya, menarik atau tidaknya calon menentukan perilaku pemilih dengan melihat partai politik, yaitu dengan cara identifikasi partai politik. Dalam hal ini setiap masyarakat memiliki identifikasi sosial yang beragam seperti identitas agama, ras, dan etnis (Munjani, Liddle, dan Ambardi, 2012).

Begitupun dalam lingkungan politik, seseorang akan mengidentifikasi dirinya dengan partai politik yang menurut nya sesuai dengan identitasnya. Yang di maksud dengan identifikasi diri dengan partai sendiri adalah orientasi atau afeksi sikap, perasaan seseorang terhadap partai politik dalam sebuah masyarakat.

a. Identitas Partai

Identitas partai adalah sebuah wadah yang dibuat sedemikian rupa untuk menampung semua aspirasi masyarakat dengan tujuan kepentingan negara.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anggota KPU Bulukumba, terkait pendekatan psikologis yang mengatakan bahwa:

“Berdasarkan pengalaman memilih saya, saya kurang memperhatikan dari partai mana kandidat/ calon yang diusung, saya cuman tahu nama dan sedikit tahu tentang beliau yang saya pilih, saya dengar dari orang-orang tidak pernah menyebut nama partai kandidat”.

(Hasil wawancara bersama SY pada tanggal 25 November 2021 pada jam 12.34)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa masyarakat mayoritas memilih tidak dikarenakan adanya ikatan emosional/ideologi terhadap partai yang menaungi calon kepala daerah, dikarenakan masyarakat kebanyakan masih belum paham dengan kepartaian jadi mereka tidak terlalu memperhatikan dari partai mana calon kepala daerah tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan anggota Bawaslu Bulukumba, terkait pendekatan psikologis yang mengatakan bahwa:

“ Dalam menentukan perilaku pemilih dengan melihat partai politik, dengan cara mengidentifikasi partai politik sebelum melakukan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati. Dalam hal ini setiap masyarakat memiliki identifikasi sosial yang beragam seperti identitas agama, ras dan etnis baik dalam lingkungan politik, seseorang akan mengidentifikasi dirinya dengan partai politik yang

menurutnya sesuai dengan identitasnya masing-masing sesuai dengan berkas yang diinginkan pihak Bawaslu untuk persyaratan pendaftaran Bupati dan Wakil Bupati”.

(Hasil wawancara bersama AR pada tanggal 25 November 2021 pada pukul 10.39)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pendekatan psikologis sudah dikatakan bagus karena pihak Bawaslu sudah mengidentifikasi semua berkas kedua kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bawaslu untuk melakukan calon Bupati dan Wakil Bupati. Agar kedua kandidat bisa mempersiapkan semua berkas sesuai dengan sistem yang sudah diterapkan oleh pihak Bawaslu.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Kepala Camat Herlang, terkait pendekatan psikologis yang mengatakan bahwa:

“Saya memang tahu partai apa yang mengusung calon yang saya pilih, tapi saya memilih calon tersebut bukan karena partainya tapi memang kandidat calonnya, saya memang tidak tahu dengan sistem kepartaian cuman tahu nama partai, lagi-lagi dari manapun partai yang mengusung calon tersebut jika saya sudah menentukan pilihan saya akan tetap memilih calon tersebut, jadi tidak ada pengaruh dari partai”.

(Hasil wawancara bersama RS pada tanggal 20 November 2021 pada pukul 08.59)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pemilih bukan memilih karena adanya persamaan ideologi dapat dilihat bahwa pemilih tidak mengerti dengan sistem kepartaian apalagi mau memilih dengan melihat partai dari calon kepala daerah dalam pemilihan.

b. Ketokohan

Ketokohan adalah representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan masyarakat sehingga tokoh tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Masyarakat Desa Bonto Kamase, terkait pendekatan psikologis yang mengatakan bahwa:

"Kalau dikatakan mengenal dekat juga tidak, saya kebanyakan melihat atau membaca dari internet bakal calon yang akan bertarung di pemilihan kepala daerah jadi saya akan tahu dengan pilihan yang akan saya pilih kedepannya, saya harus tahun calon tersebut yang dimana paling utama minimal tahu bahwa calon tersebut dapat mengeluarkan yang namanya money politik".
(Hasil wawancara bersama JR pada tanggal 27 November 2021 pada pukul 08.34)

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa Sebagian besar sebelum melakukan pemilihan, pemilih mencari tahu latar belakang calon tersebut, salah satunya adalah dengan mencari tahu dari internet bakal calon yang akan dipilih, baik itu dari biografinya, pengalaman-pengalamannya ataupun karakter dari calon kandidat tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Masyarakat Desa Bonto Kamase, terkait pendekatan psikologis yang mengatakan bahwa:

"pilihan saya cuman dari cerita orang yang sering membicarakan beliau selebihnya itu saya melihat dari poster panggir jalan, mengenal dekat dengan bakal calon saya katakana tidak, kadang saya Cuma tahu sedikit dengan calon deikarenakan saya memilih mengikuti pilihan orang tua".
(Hasil wawancara bersama JR pada tanggal 28 November 2021 pada pukul 12.17)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pemilih melakukan pemilihan hanya dikarenakan poster dari para kandidat ditambah dengan pemilih hanya mengikuti pilihan orang tuanya dalam menentukan pilihan.

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Kelurahan Bonto Kamase dalam pendekatan psikologis, masyarakat tidak terlalu memperhatikan identitas partai, dan masih ada pemilih melakukan pemilihan hanya dikarenakan poster dari para kandidat ditambah dengan pemilih hanya mengikuti pilihan orang tuanya dalam menentukan pilihan.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.

Disini peneliti akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perilaku pemilih yang membuat pembatasan antara faktor pendukung dan faktor penghambat, pada penjelasan kali ini peneliti akan mewawancarai informan apa yang menyebabkan mereka untuk memilih dan apa yang membuat mereka malas atau bahkan tidak melakukan pemilihan.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah apa-apa saja yang membuat atau membantu seseorang tertarik dalam melakukan sesuatu entah itu sarana dan prasarana atau bahkan memang seharusnya mereka melakukan itu tanpa paksaan dari

orang lain, dalam hal ini peneliti akan mewawancarai para informan mengenai apa yang membantu mereka mau untuk memilih calon kepala daerah. Dalam hal ini terkait dengan faktor pendukungnya yaitu mengenai kandidat. Salah satu informan selaku masyarakat mengatakan bahwa:

1. Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan pemilihan perempuan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Bonto Kamase, yang mengatakan bahwa:

"Figur atau kepribadian seseorang calon kepala daerah sangat menentukan penentuan pilihan masyarakat, saya pribadi dalam melakukan pemilihan tentunya melihat dari kepribadian calon kandidat tersebut, karena seseorang yang memiliki kepribadian yang baik tentunya juga akan menjadi contoh yang baik untuk rakyatnya dan menunjang kesejahteraan masyarakat karena masa depan bangsa tercermin dari pemimpinnya" (Hasil wawancara bersama IR pada tanggal 27 November 2021 pada jam 08.34).

Selanjutnya hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat memilih karena melihat dari figur atau kepribadian dari calon kepala daerah tersebut, kepribadian atau figur seorang calon kepala daerah adalah salah satu poin penting dalam penentuan pilihan masyarakat. Karena sebelum memilih seseorang harus mengenali terlebih dahulu siapa yang akan dipilihnya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat Desa Bonto Kamase, yang mengatakan bahwa:

“ Saya memilih karena sebelumnya saya sudah mengenal calon kandidat tersebut, baik itu dari kampanye yang dilakukan oleh calon dan saya sadar bahwa menjadi suatu kewajiban sebagai warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilih kita, akan lebih baik jika kita sangat berguna untuk negara kita”.

(Hasil wawancara bersama JR pada tanggal 27 November 2021 pada jam 08.34).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Bonto Kamase faktor pendukung perilaku pemilih yaitu masyarakat memilih sosok dari figure atau kepribadian dari seorang calon, kandidat yang memiliki kepribadian yang baik akan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, hal itu dapat menunjang kesejahteraan dan kemajuan suatu negara.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung suatu masyarakat adalah perilaku pemilih yaitu masyarakat memilih figure atau kepribadian dari seorang calon, kandidat yang memiliki kepribadian yang baik akan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, hal itu dapat menunjang kesejahteraan dan kemajuan suatu negara.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat adalah faktor apa saja yang menghambat masyarakat Desa Pataro tidak mau untuk melakukan pemilihan kepala daerah, disini peneliti akan mewawancarai informan berdasarkan pengalaman yang diperoleh informan selama mereka mengikuti pemilihan calon kandidat. Adapun faktor

penghambat dalam pemilihan calon kandidat di antaranya adalah:

1. Berada diluar daerah

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Pataro, yang mengatakan bahwa:

“saya biasanya malas untuk memilih karena saya kurang tahu dengan kandidat yang mencalonkan seperti siapa dia? Apa yang menjadi tujuan dari kandidat tersebut dan lain-lain dan juga sistem tunggu yang memakan banyak waktu dan saya pernah pada saat itu tidak mengikuti pemilihan disebabkan karena cuaca pada saat itu hujan”.

(Hasil Wawancara bersama JR pada tanggal 27 November 2021 pada pukul 04.34)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa selain tidak ketahuan masyarakat tentang pemilihan kepala daerah yang akan dipilih, masyarakat juga merasa malas untuk memilih dikarenakan sistem tunggu yang memakan banyak waktu. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang calon kandidat menjadi salah satu penghambat suatu pemilihan. Inilah yang menjadi penyebab masyarakat banyak yang tidak memilih. Bagi sebagian kandidat yang mencalonkan diri melakukan pengenalan diri kepada masyarakat melalui kampanye dengan menyampaikan visi misi mereka, namun ada pula yang tidak menyampaikan visi dan misi mereka. Ketidaktahuan masyarakat tentang kandidat menjadi salah satu alasan mereka tidak menggunakan hak pilihnya, ketidaktahuan tentang visi dan misi calon, tentang kepribadian dan latar belakang kepala daerah terkadang membuat masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Pataro, yang mengatakan bahwa:

“ ketika saya berada diluar daerah lain untuk menempuh pendidikan, sehingga malam untuk pulang kampung karena memerlukan biaya yag banyak dan juga jika saya memilih saya juga akan lama menunggu”. (Hasil Wawancara bersama RH pada tanggal 28 November 2021 pada jam 12.17)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Bento Kamase mayoritas mereka malas atau bahkan tidak melakukan pemilihan di karenakan mereka malas melakukan antri pada saat tempat pemungutan suara.

Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor masyarakat kebanyakan terhambat mengikuti pemilihan dikarenakan masyarakat tersebut berada diluar daerah sehingga tidak dapat ikut dalam pemilihan.

BAB V

KESIMPULAN

A. KEIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari tiga pendekatan tersebut terdapat dua pendekatan yang sangat berpengaruh dalam perilaku pemilih perempuan dalam pilkada kecamatan herlang kabupaten bulukumba maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendekatan Sosiologis, masyarakat Desa Kelurahan Bonto Kamase dalam pendekatan sosiologis yaitu masyarakat memilih calon kepala daerah melihat dari segi pendidikan suatu calon. Karena pendidikan suatu calon akan membentuk pola pikir yang sehat semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat semakin besar kecenderungan untuk berpartisipasi dalam pemilihan.
2. Pendekatan Rasional, masyarakat melihat dari visi dan misi suatu calon. Karena masyarakat sangat meningkatkan visi dan misi yang jelas dari calon tersebut beserta program-program yang akan dijalankan dengan begitu akan jelas arah kepemimpinan kedepannya.
3. Pendekatan Psikologis masyarakat Desa Kelurahan Bonto Kamase dalam pendekatan psikologis, masyarakat tidak terlalu memperhatikan identitas partai, dan masih ada pemilih melakukan pemilihan hanya dikarenakan poster dari para kandidat ditambah dengan pemilih hanya mengikuti pilihan orang tuanya dalam menentukan pilihan.
4. Faktor pendukung dan faktor penghambat adalah sebagai berikut.

a. Faktor Pendukung

faktor pendukung suatu masyarakat adalah perilaku pemilih yaitu masyarakat memilih figure atau kepribadian dari seorang calon, kandidat yang memiliki kepribadian yang baik akan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, hal itu dapat menunjang kesejahteraan dan kemajuan suatu negara.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat yaitu masyarakat kebanyakan terhambat mengikuti pemilihan dikarenakan masyarakat tersebut berada diluar daerah sehingga tidak dapat ikut dalam pemilihan.

B. SARAN

Berdasarkan Simpulan yang dikemukakan di atas, maka penulis memberikan saran atau masukan sebagai berikut:

Masyarakat sebaiknya menggunakan hak pilihnya sebaik mungkin, ssebelum pemungutan suara dimulai, massyarakat harus mengetahui dengan pasti seperti apa calon kepala daereah yang akan dipilihnya, seperti apa visi dan misi dari calon kepala daerah tersebut, kepribadiannya serta wawasan dan pengalamannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aftah, A. (2017). *Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu kadatahun 2015 (Studi pada Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar*. repository.radenintan.ac.id.
<http://repository.radenintan.ac.id/1480/>
- Akbar, I. (2017). Pilkada Serentak Dan Geliat Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal Indonesia. *CosmoGov*, 2(1), 95.
<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11852>
- ALi, M. (2018). Indonesia adalah Negara demokrasi. *Www.Kompasiana.Com*.
- Bantarani, A. (2019). *Partisipasi Politik Pemilih Perempuan Pada Pemilu Presiden Tahun 2019 (Study Perbandingan terhadap Jama'ah Pengajian Aisyiyah Kecamatan Jetis*. eprints.umpo.ac.id.
<http://eprints.umpo.ac.id/5007/>
- Diantara, I. (2020). *Analisis Perilaku Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Desa Batugung Kabupaten Jembrana*. repo.undiksha.ac.id.
<https://repo.undiksha.ac.id/1804/>
- Gischa, S. (2020). *Pemilihan Umum sebagai Wujud Demokrasi Pancasila*.
<https://doi.org/https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/04/133046169/pemilihan-umum-sebagai-wujud-demokrasi-pancasila?page=all>
- Jayawinangun, R., & Valdiani, D. (n.d.). Tipologi Partisipasi Politik Pemilih Laki-Laki Di Kabupaten Bogor Berdasarkan Penggunaan Sumber Informasi Politik. *Interaksi. Jurnal Ilmu Komunikasi*.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi/article/view/27216>
- Kala, D., & Pandemi, W. (2020). *Urgensitas Perppu Pilkada*. 4, 121–128.
- Kawengian, C. L., Pioh, N., & Kimbal, A. (2017). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Bolaang Mongondow (Studi Di Kecamatan *JURNAL EKSEKUTIF*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/17438>
- Kesuma, P. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2006 (Suatu In *ETD Unsyiah*. etd.unsyiah.ac.id.
https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=81978
- Munjani, Liddle, & Ambardi, (2012). Analisis Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca- Orde Baru. Buku Kuasa Rakyat Halaman 339
- Nur Kholis. (2021). Pilkada serentak 2020. *Polituk Studiens*.

- Nurwahidah. (2020). Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2020. *Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*.
- Rahma, I. (2019). Partisipasi Publik Dan Keterbukaan Informasi Dalam Penyusunan Kebijakan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/1101>
- Rantelore, M. R., Gosal, R., & Kimbal, A. (2017). Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 Di Kabupaten Poso Studi Di Kecamatan Pamona Selatan. *Jurnal Eksekutif*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/17426>
- Seran, G. G. (2017). Pilkada Serentak: Model, Kebijakan, Dan Kaitan Dengan Penguatan Demokrasi Elektoral Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional FHSIP-UT*, 17-35.
- SIHTE, D. F. (2018). *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Rendahnya Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017*. ... digilib.unila.ac.id. <http://digilib.unila.ac.id/30062/>
- Takasihaeng, A. L. P., Kasenda, V., & ... (2018). Perilaku Pemilih Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Di Kecamatan Manganitu. *Jurnal*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/20920>
- Topan Yuniarto. (2020). *pilkada langsung serentak serajar perkembangannya di indonesia*. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-langsung-serentak-sejarah-dan-perkembangannya-di-indonesia>



N

Lampiran 1

Surat Izin Penelitian Dari KPU, Bawaslu, KTSP, dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba

A. Surat Izin Penelitian Dari KPU


**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**
Bulukumba, 25 Nov 2021

Nomor : 532 /SDM.05.1-SD/7302/2021
Sifat :
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian
Pada Kantor KPU Kab. Bulukumba**

Yth. Kepala Dinas Perencanaan, Modal dan Pelayanan Terpadu
(DPPM/PTSP)
di:
Tempat
Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Dinas Perencanaan, Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pinta (DPPM/PTSP) Nomor : 0646/DPPM/PTSP/XI/2021, Tanggal 19
November 2021, perihal Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini:

Nama : NITA ESKA
Nomor Pusk/PS : 105641107017/ILMU PEMERINTAHAN
Institusi : UNISMUH MAKASSAR
Alamat : JL. MAJHD RAYA GANG DAHLIA NO 18, MAKASSAR

Dengan ini disampaikan bahwa KPU Kabupaten Bulukumba
Mengizinkan Penelitian Pada Kantor KPU Kabupaten Bulukumba dalam rangka
menyelesaikan SKRIPSI dengan judul "PERILAKU PEMILIH PESEMPAN
DALAM PILKADA DI KECAMATAN HERLANG" yang akan berlangsung pada
tanggal 25 November s.d 17 Januari 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami
mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut
dengan ketentuan Sebagai Berikut :

1. Mematuhi semua peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Penelitian/Pengambilan data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data.
4. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang
berangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut
diantara, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan
penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
meminya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bulukumba



B. Surat Izin Penelitian Dari Bawaslu



Alamat : Jln. Kusuma Bangsa No.6 Coile Bulukumba
Email : bawaslu.bulukumba@perhat.com, Kode Pos 92512

SURAT KETERANGAN
Nomor : 0172 /HM.02.04/K.SN-04/11/2021

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ambo Radde Junaid, SE, MH
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Bulukumba

Alamat : Desa Lonrong Kecamatan Ujung Loe

Bersama dengan surat ini menerangkan bahwa :

Nama : Nita Eska
No. Pokok : 105641107017

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Alamat : Desa Tugondeng Kecamatan Herlang

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Bawaslu Kabupaten Bulukumba pada hari Kamis Tanggal 25 November 2021 dengan Judul Skripsi "Prilaku Pemilih Perempuan dalam Pilkada di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba".

Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 25 November 2021

A KETUA,


AMBO RADDE JUNAID, SE, MH

C. Surat Izin Penelitian Dari KTSP Bulukumba

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)	
Alamat : Jl. Kenari No.13 Telp. (0413) 850600 Bulukumba 92512	
Bulukumba, 19 November 2021	
Nomor : 0646/DPMPTSP/XI/2021	Kepada :
Lampiran :	Yth. 1. Kepala KPU Kab. Bulukumba
Perihal : <u>Izin Penelitian</u>	2. Kepala BAWA/STU Kab. Bulukumba
	3. Camat Herlang Kota Bulukumba
	4. Kepala Desa Se - Kecamatan Herlang
	Makassar - Masing
	Di Tempat
Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 0746/50/Kesbangpol/XI/2021 tanggal 19 November 2021 Perihal Rekomendasi dan Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :	
Nama :	NITA ESKA
Nomor Pokok :	10564 1107017
Program Studi :	ILMU PEMERINTAHAN
Institusi :	UNISMU MAKASSAR
Alamat :	JL. MESJID RAYA GANG DAHLIA NO. 18 MAKASSAR
Bermaksud melakukan Penelitian di Kantor KPU, Bawastu, Kecamatan Herlang dan Desa Se - Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dalam rangka SKRIPSI dengan judul "PERILAKU PEMILIH PEREMPUAN DALAM PILKADA DI KECAMATAN HERLANG" yang akan berlangsung pada tanggal 17 November 2021 s/d 17 Januari 2022.	
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :	
1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat. 2. Tidak mengganggu keamanan ketertiban masyarakat setempat. 3. Penelitian/pengambilan data menyimpang dari izin yang diberikan. 4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba. 5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.	
Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
 PIL. KEPALA DINAS (r) FAMSUL MULHAYAT, S.H., M.H. : Pembina Utama Muda : 19640522 199203 1 004	
Tembusan: 1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan); 2. Kepala Kesbangpol Kab. Bulukumba di Bulukumba; 3. Arsip.	

IZIN PENELITIAN FENOMENA

D. Surat Izin Penelitian Dari Kantor Pemerintahan Kabupaten Bulukumba


PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Dr. Sutomo No. 4 Telp. (0413) 85903 Bulukumba 92511

UNIVERSITAS MUHAMMAD YAHYIAH MAKASSAR

PERILAKU PERILAKU PEREMPUAN DALAM PILKADA DI KECAMATAN HERLANG

Nomor: 674/SK/2021
Sifat: Baku
Lampiran: 1
Perihal: Rekomendasi

Kepada:
Yth. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Pelayaran
Terpadu Sekretariat Kab. Bulukumba
di:
Jalan Kenari No. 13 Bulukumba

Berikut ini Surat Keputusan LP3M UNISMUH Makassar Nomor: 4999/MSAC/4-V/II/21/45/2021 tanggal 16 November 2021 Perihal: Rekomendasi Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Kepala/Ditua/ahli yang tersebut dibawah ini:

Nama: NIFA ESKA
Tempat/Tgl. Lahir: Tugondong, 20-05-1999
No Ponsel: 085641103017
Program Studi/Prodi: Ilmu Pemerintahan
Jenis Kelamin: Perempuan
Pekerjaan: Mahasiswa UNISMUH Makassar
Alamat: Jl. Masjid Raya Gang Dabba No. 18 Makassar
Hp: 0853446251223
Email: nifaraka98@gmail.com

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Kantor KPL dan Bawaslu dan Dinas Harlang dan dus...
se Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dalam rangka Penyelesaian Skripsi dengan Judul:

“ PERILAKU PERILAKU PEREMPUAN DALAM PILKADA DI KECAMATAN HERLANG ”

Selama: 17 November 2021 s.d 17 Januari 2022
Pengikut/Ang. Team: 1 orang

Selubungan dengan hal tersebut diatas dianggap layak mendapatkan Surat Keterangan Penelitian.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dimaklumi dan berlaku seterusnya.

Bulukumba, 19 November 2021

KEPALA KANTOR


AHMAD ARFAN, S.P., MT
Pangkat: Pembina Tk. I
NIP: 19721212 199202 1 001

Tembusan:

1. Bopri Bulukumba (sebagai laporan)
2. FKPD Kab. Bulukumba
3. Ketua LP3M UNISMUH di Makassar
4. Peninggal

Lampiran 3

Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara dengan Kepala KPU Bulukumba



Pada Hari Kamis, 25 November 2021

2. Wawancara dengan Anggota Bawaslu Bulukumba



Pada Hari Kamis, 25 November 2021

3. Wawancara dengan masyarakat Kelurahan Bonto Kamase



Pada Hari Sabtu 27 November 2021

4. Wawancara dengan Ibu Camat Desa Herlang dan Aparat Desa

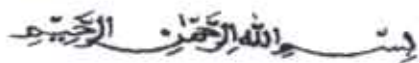


Pada Hari Sabtu 20 November 2021

5. Wawancara dengan Masyarakat Bonto Kamase



Pada Hari Kamis 22 November 2021

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nita Eska

NIM : 105641107017

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9%	10 %
2	Bab 2	25%	25 %
3	Bab 3	3%	10 %
4	Bab 4	6%	10 %
5	Bab 5	2%	5 %

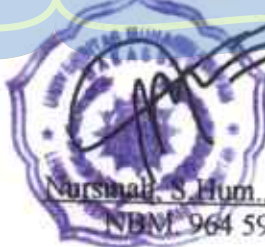
Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 25 Januari 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursnaili S. Hum, M.I.P

NBM. 964 591

AB I - Nita Eska 105641107017

by Tahap Tutup



Issued date: 25-Jan-2022 12:22PM (UTC+0700)

Issued ID: 1747657518

File name: BAB_1_NITA.docx (70.71K)

Page count: 2028

Character count: 13025

ORIGINALITY REPORT

	9%	4%	3%	8%
	SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES				
Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper				2%
ejournal2.undip.ac.id Internet Source				2%
Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper				2%
Putri Rezkia Salam, Hardianto Hawing, Muhammad Randhy Akbar. "Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Kawasan Tanjung Bunga Kota Makassar" Journal of Government and Politics (JGOP), 2020 Publication				2%
garuda.kemdikbud.go.id Internet Source				2%

Include quotes On
Include bibliography On

Exclude matches

< 2%

AB II - Nita Eska 105641107017



ission date: 25-Jan-2022 12:59PM (UTC+0700)

ission ID: 1747678343

ame: BAB_II_4.docx (64.1K)

count: 4851

cter count: 33297

ORIGINALITY REPORT

25%	26%	8%	15%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

Click ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

repo.iain-tulungagung.ac.id
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches < 2%





ssion date: 25-Jan-2022 01:00PM (UTC+0700)

ssion ID: 1747678834

me: BAB_III_3.docx (22.03K)

count: 928

cter count: 6151

ORIGINALITY REPORT

3%	2%	2%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

ATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

Angkasawati, Devi Milasari. "PENGEMBANGAN
SAR TRADISIONAL DALAM MENINGKATKAN
NAT PENGUNJUNG DI PASAR TRADISIONAL
YOLANGU KEC. BOYOLANGU TULUNGAGUNG",
nal PUBLICIANA, 2021
cation

clude quotes

On

clude bibliography

On

Exclude matches

2%



BAB IV – Nita Eska

105641107017

by Tahap Tutup

ssion date: 25-Jan-2022 01:01PM (UTC+0700)

ssion ID: 1747679368

me: BAB_IV.docx (105.26K)

count: 4465

cter count: 28452

ORIGINALITY REPORT

5%	4%	0%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

ATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id
net Source

clude quotes On
clude bibliography On



BAB V - Nita Eska

105641107017

by Tahap Tutup

ssion date: 25-Jan-2022 01:02PM (UTC+0700)

ssion ID: 1747679627

me: BAB_V_1.docx (19.76K)

count: 710

ter count: 5492

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

CLICK ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

scribd.com

Internet Source

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

< 2%



RIWAYAT HIDUP



NITA ESKA lahir di Tugondeng pada tanggal 20 mei 1999, anak kedua dari lima bersaudara. Buah hati dari pasangan Kamaruddin dan Suharni. Riwayat pendidikan : Tamat pada tahun 2011 di SDN 119 Karassing. Di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan SMP Negeri Satap Satu Bulukumba dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun yang sama pula, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 6 Bulukumba dan tamat pada tahun 2017. Setelah tamat SMA pada tahun 2017, penulis kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi pada program strata satu Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan terdaftar pada program studi Ilmu pemerintahan.